

MENCARI ALAS AKAR KONFLIK PERTANAHAN: SUATU TINJAUAN DINAMIKA MASYARAKAT PEDESAAN DI JAWA

Martua Sihaloho

Staf Pengajar pada Bagian Kependudukan, Agraria, dan Ekologi Politik, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

ABSTRACT

Agrarian conflicts are one of agrarian facts and also become the popular 'main theme' in many discussions and studies in Indonesia. Cases and studies of land and sea agrarian source are the two important agrarian objects, for their connection to dominant source for many sides involved. The reality that happened on the natural/agrarian source management is one of the aspects that can make village society more dynamics, both in Java and outside Java. This writing tries to assess how conflicts among sides and the impacts on social life, especially in society development dynamic review. Some basic root of agrarian conflicts are society access level to land, regulations and outsider programmes, the fading of local institutions, threat to society existence, and other things that connecting to local institutions.

Keyword: basic root of conflicts, agrarian source, and village society dynamic.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumberdaya alam/agraria merupakan upaya dan program-program pembangunan yang dilaksanakan berbagai pihak selama ini. Sumberdaya agraria yang dimaksud adalah tanah, air, udara, dan lain-lain. Sumberdaya alam/agraria tersebut berhubungan secara teknis dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung yaitu masyarakat, pemerintah dan swasta. Ketiga pihak tersebut dapat dipahami sebagai *stakeholders* yang memanfaatkan sumber-sumber agraria. Ketiga pihak tersebut juga memiliki hubungan sosio-agraria satu dengan yang lainnya (Sitorus 2002). Hubungan yang terbentuk juga dapat bersifat mendekatkan (*assosiatif*) maupun yang bersifat menjauhkan (*dissosiatif*). Tentu saja hubungan yang bersifat *dissosiatif* merupakan hubungan yang tidak diharapkan akan tetapi fakta menunjukkan bahwa hubungan ini marak terjadi dewasa ini.

Persoalan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumber-sumber agraria/alam senantiasa menjadi isu penting pasca bergulirnya reformasi di Indonesia karena selain sebagai faktor produksi juga dipandang sebagai faktor yang sangat menentukan hubungan sosial dan perkembangan budaya masyarakat. Kasus ini marak terjadi di Indonesia karena ketergantungan komunitas/masyarakat terhadap tanah sangat tinggi. Pertanyaannya adalah mengapa

ketimpangan ini terjadi dan bagaimana dampak selanjutnya dalam kondisi demikian? Serta bagaimana implikasinya terhadap dinamisasi masyarakat pedesaan di Jawa?

PENDEKATAN TEORETIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Struktur Agraria Masyarakat Pedesaan

Memahami struktur masyarakat pada dasarnya adalah hal penting dalam mengkaji berbagai kajian yang kita lakukan. Struktur tersebut juga menggambarkan bagaimana hubungan antara sumber-sumber agraria/sumber daya alam (obyek agraria; air, udara, tanah, ruang angkasa) dengan subyek agraria (pemerintah, swasta dan masyarakat) saling memiliki hubungan sosio-agraria.

Sitorus (2002) mengemukakan bahwa struktur agraria di Indonesia secara empiris dapat diamati keberadaannya dalam wujud perusahaan-perusahaan perkebunan/perhutanan/pertambangan/perikanan (tipe kapitalis, sumber-sumber agraria dibawah penguasaan negara (tipe sosialis?), dan usaha-usaha pemanfaatan sumber-sumber agraria skala rumah tangga (tipe populis/neo-populis). Tetapi tampaknya ada kecenderungan tipe struktur agraria di Indonesia menuju tipe kapitalis. Gerakannya cukup jelas: transaksi-transaksi sumber-sumber agraria antara ketiga subyek agraria tersebut, cenderung menuju gejala akumulasi penguasaan sumber-sumber agraria di pihak swasta. Beberapa tipe struktur agraria lainnya adalah tipe feodalis, kapitalis dan sosialis.

Salah satu yang menjadi dasar penggolongan masyarakat dalam lapisan masyarakat adalah akses masyarakat terhadap tanah. Sebenarnya sama dengan yang lainnya, merupakan sumberdaya yang dianggap lebih dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Tak dapat disangkal juga bahwa realitas ini juga terjadi menurut budaya masyarakat dan yang lebih penting lagi adalah menyangkut ruang dan waktu realitas ini terjadi.

Menurut Wiradi (1998), struktur agraria terdiri dari tiga tipe yaitu (a) Tipe Kapitalis: sumber-sumber agraria dikuasai oleh non-penggarap (=perusahaan), (b) Tipe Sosialis: sumber agraria dikuasai oleh negara/kelompok pekerja; dan dan (c) Tipe Populis/Neo-Populis: sumber agraria dikuasai oleh keluarga/rumah tangga pengguna.

Konsep Konflik dan Gerakan Petani

Menurut Wiradi (1999), konflik agraria merupakan gejala sosial dalam situasi proses interaksi dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas obyek yang sama yaitu sumberdaya agraria itu sendiri. Pada tahapan saling berlomba untuk mendahului mencapai obyek itu maka sifatnya masih berupa persaingan. Tetapi pada saat antar

pihak saling berhadapan untuk memblokir jalan lawan terjadilah situasi konflik. Jadi konflik adalah bentuk ekstrim dan keras dari persaingan (Cf. T.F. Hoult, 1969 *dalam* Wiradi, 1999).

Konflik dapat dikatakan sebagai gerakan petani untuk melakukan tuntutan-tuntutannya pada pihak-pihak tertentu. Lansberger (1984) mengemukakan bahwa gerakan adalah sebuah reaksi kolektif terhadap kedudukan rendah. Untuk mengkaji gerakan Lansberger mengusulkan menggunakan empat dimensi yaitu (1) tingkat adanya kesadaran bersama tentang nasib yang dialami, (2) tingkat dimana aksi itu bersifat kolektif baik dalam lingkup orang yang terlihat ataupun dalam tingkat koordinasi dan organisasi aksi, (3) lingkup dimana aksi itu bersifat berorientasi instrumental dan (4) tingkat dimana reaksi itu didasarkan secara eksklusif atas kerendahan status sosial, ekonomi dan politik.

Aspek-Aspek Dinamisasi Masyarakat Pedesaan

Pada hakikatnya seluruh proses yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dapat disebut sebagai aspek dinamisasi masyarakat. Beberapa aspek dinamisasi yang relevan sekaligus memperhatikan eksistensi masyarakat adalah aspek sosial-budaya, ekonomi, politik dan bahkan ideologi. Aspek-aspek tersebut saling terkait dalam mendinamisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kehidupan bermasyarakat berkaitan dengan bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh orangtua atau generasi sebelumnya terhadap anak-anaknya (generasi sesudahnya). Dalam hal sosialisasi, maka yang akan diajarkan adalah bagaimana berinteraksi dengan orang lain baik terhadap kerabat atau bukan, ataupun kepada teman sebaya atau sepermainan maupun pada orang yang lebih muda atau lebih tua. Keseluruhan nilai dan norma ini tidak hanya diperoleh individu dari keluarganya melainkan dari masyarakat, sekolah atau lembaga lainnya.

Selama eksistensi masyarakat belum terganggu maka hubungan yang terjadi antar pihak akan relatif harmonis, tetapi jika sudah terancam maka yang timbul adalah hubungan yang disharmonis. Pengelolaan lahan oleh 'pihak luar' (baik swasta, maupun program aras atas desa) melalui konversi lahan juga turut mempengaruhi aspek dinamisasi masyarakat. Salah satu kontrol yang berperan adalah 'budaya lokal' dan sejauh mana kelembagaan lokal dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Kerangka Pemikiran

Pembangunan (proses menuju ke arah yang lebih baik) idealnya pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu ekonomi, sosial, budaya, politik dan bahkan ideologi,

termasuk aspek fisik seperti teknologi, ataupun sarana dan prasarana lainnya. Kajian atas pembangunan menyangkut wilayah, paling tidak dapat kita bedakan menjadi dua bagian yaitu pembangunan untuk wilayah kota (*urban*) maupun untuk wilayah desa atau pedesaan (*rural*).

Pembangunan di atas tidak jarang dilakukan menurut prioritas dan program-program yang telah 'dirangcang' khusus oleh para pengambil kebijakan. Namun yang patut dicermati adalah sering sekali pembangunan dilakukan berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

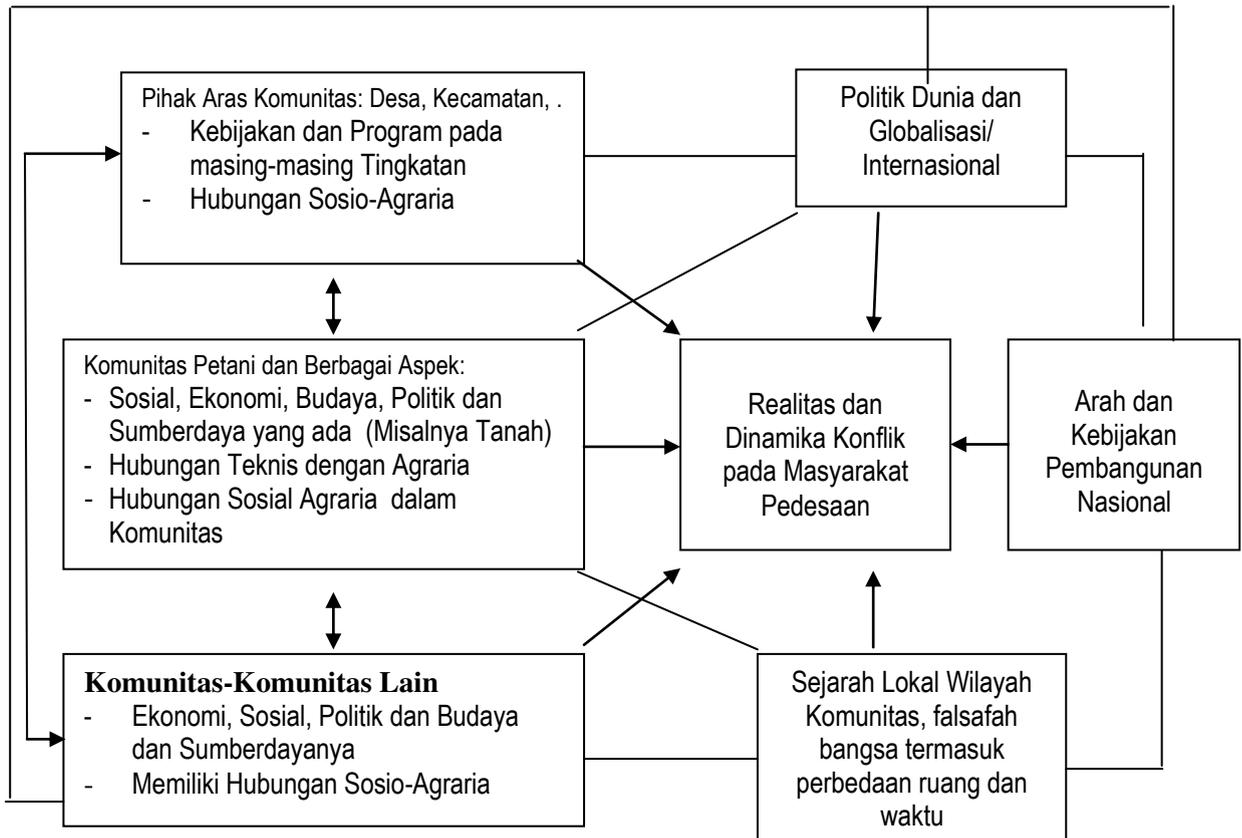
Salah satu sumberdaya utama dan juga menjadi permasalahan komunitas petani adalah tanah. Sebagaimana disebut di atas, setiap individu ataupun *stakeholders* memiliki hubungan teknis dengan tanah dan antar *stakeholders* atau subyek agraria memiliki hubungan sosial-agraria (sosio-agraria). Sejarah dan perbedaan akses terhadap sumberdaya agraria ini kemudian membentuk hubungan-hubungan antar *stakeholders* yang menghasilkan berbagai pola.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya agraria adalah berbagai gejolak sosial dan fenomena-fenomena telah mengisi 'relung' realitas dinamika masyarakat pedesaan. Realitas inilah yang sebaiknya ditanggapi dengan arif bijaksana dalam mewujudkan dinamisasi masyarakat desa dalam perspektif politik pedesaan yang demokratis dan berkeadilan. Hanya saja, pihak yang akses terhadap sumberdaya dan dekat dengan kekuasaan akan tetap mendominasi realitas yang terjadi.

Dinamika konflik komunitas dipengaruhi dan terkait dengan berbagai pihak-pihak tertentu. Selain aspek politik, aspek lain yang dominan dalam pemanfaatan sumberdaya agraria adalah aspek ekonomi, sosial-budaya dan sumberdaya agraria tanah. Aspek dan sumberdaya tanah tersebut sangat mempengaruhi dinamika konflik komunitas petani di pedesaan. Di samping itu, realitas dan dinamika politik pada masyarakat pedesaan terkait dengan 'aspek kesejarahan suatu wilayah' dan bagaimana intervensi dan peranan pemerintah baik pada aras desa, kecamatan ataupun pada aras yang lebih tinggi dan bagaimana politik dunia/globalisasi internasional serta arah dan kebijakan pembangunan nasional turut mempengaruhi dinamika konflik.

Kepemilikan sumberdaya agraria dan sumberdaya lainnya dapat menyebabkan masyarakat lebih akses pada pengambilan keputusan atau dekat dengan kekuasaan paling tidak pada tingkat lokal. Adakalanya komunitas ini 'kurang' diperhitungkan atau dianggap 'kurang' penting dalam 'dunia politik'. Namun disadari atau tidak, partisipasi komunitas ini dalam 'kancah' politik, paling tidak pada aras lokal merupakan suatu potensi yang patut diperhitungkan. Dan untuk mewujudkan suatu dinamika masyarakat pedesaan yang diharapkan, maka prinsip partisipasi untuk mewujudkan pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan merupakan salah satu upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas 'jejaring' sosial. Hasil 'jejaring sosial' yang terjadi

dapat berupa proses sosial yang mendekatkan (*assosiatif*) atau menjauhkan (*dissosiatif*). Secara ringkas kerangka pemikiran di atas dapat di lihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran Dinamika Konflik dalam Memahami Alas Akar Konflik

KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA: SUATU HASIL IDENTIFIKASI

Permasalahan agraria telah dimulai sejak zaman kolonial. Pada jaman tersebut tanah dikuasai oleh kolonial, tuan tanah dan raja. Namun, didominasi oleh kolonial sehingga petani harus mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam/agraria berdasarkan keinginan kolonial. Setelah berlangsungnya zaman kolonial, maka bentuk penguasaan yang timpang atas tanah juga menjadi realitas dimana sudah terjadi 'sistem bagi hasil' atau pola kerjasama lainnya. Bentuk-bentuk usaha itu dilakukan oleh petani adalah untuk mempertahankan subsistensinya sesuai dengan pendapat Scott (1983) dan Popkin (1986).

Scott (1983) mengemukakan ada norma resiprositas dan etika subsistensi yang menempatkan hubungan patron–klien antara petani dan pemilik tanah sebagai suatu hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jaminan sosial yang dapat diberikan patron adalah pada saat terjadi gagal panen atau kemalangan sebaliknya loyalitas dan legalitas diberikan klien terhadap patronnya. Selanjutnya, Popkin (1986) mengemukakan hal yang berbeda dengan Scott, menurutnya meskipun kehidupan ekonomi petani selalu berada disekitar garis marjin, sebagai makhluk rasional petani selalu akan mencari kemungkinan untuk memperbaiki taraf hidupnya, dimana dari waktu ke waktu petani mampu mendapatkan surplus dari hasil usahanya. Dengan kata lain tindakan yang dilakukan oleh petani tidak semata-mata karena pertimbangan moral dan solidaritas seperti yang dikemukakan Scott melainkan pada pertimbangan manfaat apa yang bisa diperolehnya.

Perlawanan petani pada dasarnya berawal dari ‘ancaman’ terhadap subsistensinya karena harapan ataupun tujuan hidup dimiliki oleh petani ataupun siapa saja. Demikian juga dengan keinginan penguasaan dan pemilikan atas sumberdaya selalu diharapkan siapa saja untuk mencapai kebahagiaan¹. Harapan petani lainnya akan bermuara pada kesejahteraan petani. Semua ini akan berhadapan dengan harapan ‘pihak luar’ (pemerintah, swasta) setelah berhadapan dengan sistem feodal yang telah lama ‘menghimpit’ gerak petani. Masuknya kapitalisme² ini lebih memperparah kehidupan petani khususnya petani dan masyarakat lainnya dieksploitasi baik sumberdaya alam/agrariannya maupun sumberdaya manusianya berupa tenaga kerja yang upahnya belum tentu dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Fakta menunjukkan keadaan dan kehidupan petani semakin sulit, petani makin tidak akses terhadap sumberdaya, sementara mereka sangat membutuhkannya. Selanjutnya, mempertimbangkan tingkat ketergantungan hidup yang tinggi, petani mempertanyakan kebijakan pemerintah, pemodal yang sangat berorientasi terhadap keuntungan, penggunaan teknologi yang ‘kurang ramah lingkungan’ atau merusak sumberdaya yang ada, usaha peningkatan produksi pertanian tidak selalu membawa keuntungan bagi petani karena harga sangat menentukan (misalnya harga turun drastis saat panen), masyarakat ‘kurang dihargai’ dalam pengambilan keputusan, tidak dapat dipungkiri juga permasalahan dan ‘keretakan’ di kalangan petani juga

¹ Kebahagiaan seseorang tidak ada batasnya dan pemenuhan materi bukan berarti menjamin kebahagiaan.

² Menurut Bahari (1999), penetrasi kolonialisme dan tekanan demografis yang semakin meningkat mengakibatkan rusaknya pola-pola asuransi sosial yang sudah ada sebelumnya di Asia dan menghasilkan sendi-sendi moral ekonomi petani yang didasarkan atas etika subsistensi petani. Selanjutnya Bahari mengemukakan dua transformasi penting yang terjadi di era kolonial adalah (1) pengalihan secara besar-besaran di sektor pertanian, dari pertanian subsisten ke pertanian yang berorientasi ekspor, seperti tanaman tebu, kopi, kina dan lain-lain serta (2) dibentuknya negara modern yang ditopang oleh birokrasi dan militer untuk mengontrol wilayah jajahan.

memperlancar tujuan 'pihak luar'. Fakta-fakta lainnya adalah upaya peningkatan keuntungan pada pihak tertentu yang belum pasti menguntungkan golongan lemah, petani, dan komunitas lainnya.

Pertentangan antara harapan petani dengan tujuan kapitalis (pihak luar) atau benturan antara pihak yang 'kurang berkuasa' dengan penguasa, antara yang 'tertindas' dengan 'penindas' atau antara yang 'kurang akses terhadap sumberdaya' dengan yang akses terhadap sumberdaya, dan lain sebagainya merupakan realitas yang menghasilkan benturan, perlawanan, resistensi, dan konflik. (Tambahkan kalimat atau paragraf yang mengantarkan pada bagian selanjutnya)

Kasus Ngawi di Jawa Timur

Kasus konflik pertanahan di Ngawi ini terjadi di dua desa yaitu Desa Cepoko dan Mendiro, kecamatan Ngrambe. Masyarakat memandang tanah yang di HGU-kan kepada Pemda setempat sebagai milik dan warisan para leluhur pembuka desa mereka yang pertama. Leluhur mereka ini dipercaya menjadi pemilik yang paling sah dan otentik atas lahan tersebut karena mereka yang pertama-tama membuka dan membangun serta mendiami kampung termasuk mengerjakan lahan-lahan pertanian baik lahan sawah maupun lahan kering. Anggapan inilah yang selanjutnya menjadi acuan masyarakat untuk menuntut hak milik atas tanah.

Pihak PD Sumber Bhakti yang mendapat HGU³ untuk menggarap tanah tersebut merasa terkejut dan tidak merespon positif kehendak masyarakat. Hal ini kemudian memunculkan pertentangan antara masyarakat dan perusahaan. Dalam kenyataannya, warga masyarakat lokal sebenarnya masih turut terlibat bekerja sebagai buruh tani pada tanah perkebunan. Akan tetapi, penghasilan yang diperoleh dari buruh tani dan pertanian belum dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehidupan pada saat itu sangat sulit dirasakan oleh warga masyarakat khususnya yang menjadi buruh tani.

Kondisi ekonomi warga hanya mampu bertahan hidup secara sangat sederhana dengan membuka usaha kecil atau terpaksa bermigrasi ke luar kota⁴. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa faktor yang menyebabkan konflik sebagaimana diuraikan Fiser *et al* (2000) adalah karena kebutuhan fisiologis yang tidak dapat dipenuhi. Masyarakat sangat menderita, anak banyak yang putus sekolah. Kondisi sulit yang sudah dialami saat itu semakin diperparah semenjak terjadi pengalihan HGU dari PD Sumber Bhakti kepada PT Naga Mas, di mana pihak yang disebut terakhir ini ternyata malahan menutup peluang bagi warga masyarakat sekitar untuk terlibat bekerja sebagai buruh tani seperti pada waktu sebelumnya. Akibatnya sudah dapat diduga situasi

³ HGU nomor 20/HGU/BPN/1990

⁴ Biasanya yang melakukan migrasi ke kota adalah laki-laki atau kepala rumah tangga. Namun demikian, penghasilan yang diperoleh belum mencukupi khususnya untuk biaya anak sekolah walapun hanya sampai pada tingkat SLTP.

ekonomi masyarakat semakin sulit. Sebagaimana dituturkan oleh seorang warga “*Untuk makan saja susah, apalagi menyekolahkan anak. Kami juga tidak diikuti lagi bekerja sebagai buruh yang kemudian memperparah perekonomian kami*”. Kenyataan yang mereka alami ini kemudian menimbulkan agresi (rasa benci terhadap PD Sumber Bhakti)⁵. Agresi ini selanjutnya diwujudkan dengan tuntutan (?) keras untuk menuntut tanah warisan leluhur melalui berbagai aksi.

Atas aksi yang dilakukan oleh pihak masyarakat, maka pihak perusahaan perkebunan harus mengalami kerugian⁶. Puncak dari aksi perjuangan masyarakat adalah menduduki tanah perkebunan dan tahun 1995 masyarakat telah mengusahakannya dengan menanam padi. Masyarakat yang melakukan perlawanan di cap sebagai antek PKI atau cap-cap lainnya yang intinya bermakna negatif yang menentang masyarakat sebagai pemicu timbulnya konflik (Soetarto *et al* 2001)

Kasus Tanah Jenggawah di Jawa Timur

Tulisan Nurhasim (1997) menjelaskan bahwa pergolakan petani telah dimulai sejak tahun 1969. Peristiwa yang mendahului adalah gagalnya pelaksanaan *landreform* atau orang desa (petani) menyebutnya dengan pengaplingan tanah, karena tanah yang luas dikapling-kapling menjadi 0,3 ha untuk masing-masing bagian. Konflik yang muncul karena gagalnya *landreform* telah mereda dan dilanjutkan muncul kembali pada tahun 1969 yaitu pada saat pemberlakuan SK Mendagri No. 32/HGU/DA/1969 kepada PPN XXVII—yang dianggap gagal. Konflik kembali marak tahun 1979 dan berlanjut hingga tahun 1995.

Dalam kurun waktu tahun 1980-1994 telah diupayakan konsolidasi untuk memperjuangkan tanah *erpacht* adalah (1) melalui jalur permohonan legal (konsultasi hukum) dan (2) dengan tindakan konsistensi perjuangan tentang tanah yang mereka minta, terutama kesiapan menanti masa berakhirnya HGU 1995. Kurun waktu masa penantian kurang lebih 25 tahun merupakan endapan masalah yang sangat membakar emosi warga pada tahun 1995 yang memutuskan HGU diperpanjang lagi. Akibatnya, petani Jenggawah dan petani Kaliwining kembali memporak-porandakan rumah dan gudang di wilayah Dusun Curahwelut, Desa Pancakarya, Kecamatan Jenggawah, serta Dusun Curah Suku dan Curah Bateng, Desa Kaliwining sama seperti yang pernah mereka lakukan tahun 1979. Rasa ketidakpuasan ini dilihat dari tiga

⁵ Berdasarkan penuturan warga lainnya kondisi yang dialami saat itu (PT Naga Mas) merupakan suatu kondisi yang lebih parah jika dibandingkan dengan pada masa penjajahan. Dengan demikian mereka merasa tidak dapat bertahan terus dengan penderitaan yang dirasakannya.

⁶ Bidang usaha perkebunan di Desa Cepoko dan Mendiro merupakan basis dan andalan PD Sumber Bhakti (Wawancara dengan staf PD Sumber Bhakti yang hingga kini masih tetap eksis. Namun lebih terfokus pada bidang kerja koperasi).

kerawanan struktural Scottian (struktural, ekologis dan monokultur). Kerawanan struktur pada Kasus Jenggawah mengakibatkan protes petani dan kekerasan.

Kelompok yang berkonflik pada kasus Jenggawah adalah petani inti basis dan kelompok penekan yang mendukung petani berhadapan dengan PTP XXVII petani buruh, mandor dan centeng. Selain dua pihak itu masih ada tim mediator, petani fiktif serta negara dan aparatnya. Dua puluh lima (25) tahun masyarakat telah menantikan berakhirnya HGU dan masyarakat dapat kembali akses pada tanah. Protes kelompok petani ini pada dasarnya karena persoalan kesejahteraan petani dan keluarganya.

Kasus Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah.

Pada kasus Waduk Kedung Ombo (selanjutnya disingkat WKO) merupakan konflik vertikal dalam hak atas tanah antara pemerintah dan masyarakat. Pihak pemerintah menggunakan dalil pembangunan untuk merubah pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam/agraria menjadi sebuah WKO yang diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian melalui peningkatan saluran irigasi.

Permasalahan dalam pembangunan WKO dapat dipahami sebagai suatu pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan yang salah karena masyarakat tidak pernah diikuti dalam proses pengambilan keputusan khususnya dalam menyampaikan aspirasinya. Misalnya dalam penyampaian ganti rugi yang akhirnya diselesaikan dengan menggunakan kekuatan militer. Ganti rugi yang ditentukan tidak sesuai dengan harapan petani sehingga petani melakukan pembangkangan dan menolak ganti rugi yang diberikan. Beberapa hal yang menunjukkan pendekatan yang salah adalah pendekatan aparat yang tidak simpatik, kesimpangsiuran dan rendahnya harga ganti rugi, manipulasi musyawarah dan cap jempol, intimidasi dan penangkapan (memberi predikat PKI atau eks Tapol), terganggunya tatanan tradisional dan kembali suburnya berbagai mitologi (Yufriawaty, 2001).

Husein (1997) mengemukakan hal bahwa pada kasus WKO dikenal dengan fenomena tebu, 'habis manis sepah dibuang' yang telah banyak dirasakan masyarakat pedesaan itu merupakan alasan klasik, karena pasokan listrik yang dianggarkan untuk mereka ternyata proporsinya masih sangat kecil. Hingga tulisan Husein dibuat, setelah WKO berdiri dan bangunan pembangkit listrik di beberapa daerah lain berfungsi, masih tidak mudah untuk memperoleh aliran listrik tanpa harus menghamba atau mengemis. Hal lain yang dapat disaksikan adalah bahwa kondisi masyarakat belum sejahtera dengan keberadaan WKO.

ALAS AKAR KONFLIK AGRARIA DAN DINAMISASI MASYARAKAT PEDESAAN

Ketimpangan Struktur Agraria dan Perubahannya

Benang merah tiga kasus yang dikemukakan di atas adalah bahwa program pembangunan yang dilakukan adalah bias elit lokal dan lebih berpihak pada kepentingan perusahaan (swasta) dan pemerintah. Di satu sisi masyarakat sangat membutuhkan sumberdaya (tanah), di sisi lain dalil pembangunan dan orientasi keuntungan oleh pemodal dan pemerintah. Titik kritisnya adalah pada akses lahan dan bagaimana kesejahteraan masyarakat pada tahap setelah program dilaksanakan.

Masyarakat melakukan perlawanan karena tuntutan subsistensi, untuk kebutuhan pokok. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa faktor yang menyebabkan konflik sebagaimana diuraikan Fisher *et al* (2000) adalah karena kebutuhan fisiologis yang tidak dapat dipenuhi. Masyarakat sangat menderita, anak banyak yang putus sekolah, kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi, masyarakat tidak akses pada perusahaan dan dampak lainnya yang lebih berorientasi pada kepentingan 'pihak luar'.

Ketertinggalan Komunitas terhadap Lahan

Keadaan sosial ekonomi petani yang memburuk saja belum tentu dianggap cukup untuk menciptakan prasyarat bagi pemberontakan petani. Peristiwa-peristiwa ekonomi yang membuat petani menderita, seperti kegagalan panen atau serangan penyakit yang mematikan, pada akhirnya secara perlahan-lahan dapat diterima oleh mereka sebagai keadaan yang normal. Sifat evolutif petani karena biasa ditempa oleh kondisi yang buruk sehingga mampu menyerap perubahan-perubahan yang terjadi di pedesaan dengan menggunakan pelbagai cara untuk mempertahankan *survival* mereka. Cara-cara ini dikenal sebagai strategi adaptasi petani dalam menghadapi lingkungan disekelilingnya, dengan mengambil bentuk seperti: intensifikasi kerja, migrasi jangka pendek, mengurangi konsumsi atau mengubah pola konsumsi, mencegah keluarga besar menjadi keluarga kecil untuk mengurangi jumlah mulut yang akan ditanggung khususnya yang bermatapencaharian dari hasil pertanian.

Fakta yang mengungkap hal di atas sudah lama terjadi yaitu terjadinya kemiskinan berbagai (*shared proverty*) sebagaimana dijelaskan Geertz (1974). Kondisi ini terjadi karena tingkat akses masyarakat terhadap lahan semakin berkurang atau dengan kata lain telah terjadi ketimpangan struktur agraria dalam hal kepemilikan dan penguasaan. Salah satu faktor penyebabnya adalah lahan semakin terfragmentasi dan terkonversi karena sistem pewarisan.

(Dua paragraf di atas belum menjelaskan maksud dari Ketergantungan Komunitas terhadap Lahan Oleh karena itu tambahkan lagi uraian pada bagian ini)

Memudarnya Kelembagaan Lokal

Tim Lapera (2001) mengemukakan beberapa hal yang menunjukkan memudarnya kekuatan lokal atau kelembagaan lokal yang dikembangkan oleh Orde Baru. Beberapa hal yang menjadi acuannya adalah (a) masalah proses pembentukan yakni dibentuk dari atas; (b) tujuan-hampir seluruh kelembagaan yang ada, memasukkan tujuan makro dan mengabaikan tujuan dekat; (c) inisiatif, latar belakang pendirian kelembagaan lokal. Hampir semua kelembagaan yang memiliki papan nama di kantor kepala desa adalah kelembagaan yang dibentuk dengan skema *top down*; (d) struktur kelembagaan dan pusat kekuasaan struktur yang umum digunakan adalah pembentukan hierarki -dengan sedikit mungkin peluang berlangsungnya partisipasi masyarakat; (e) arah loyalitas lembaga, loyalitas lembaga ke atas, dan (f) posisi masyarakat marginal, dan hanya menjadi pengikut yang haknya relatif sedikit. Dalam hal ini, apa yang disampaikan Tim Lapera di atas dapat menjadi acuan untuk lebih memberdayakan masyarakat.

Program Pihak Luar dan Terganggunya Eksistensi Masyarakat

Eksistensi masyarakat merupakan bagian ataupun secara keseluruhan yang akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, keberadaan komunitas lokal, yang secara budaya lokal ataupun sosialisasi kebudayaan secara turun-temurun 'melarang' segala bentuk upaya eksploitasi dan program-program yang cenderung 'merusak' maka mempertahankan 'budaya lokal' itu sendiri merupakan eksistensi masyarakat atau komunitas tersebut. Sebagai contoh, masyarakat di pedalaman Kalimantan yang 'marak' didatangi oleh 'pihak luar' dengan berbagai program yang diajukan. Dapat dipastikan, selama masyarakat merasa tidak terganggu eksistensi komunitasnya, maka masyarakat akan tetap merasa 'nyaman' dan menerima keberadaan pihak luar khususnya program.

Fakta menunjukkan bahwa masyarakat tidak jarang mengalami permasalahan yang berarti dengan hadirnya pihak luar. Beberapa kasus yang dapat disampaikan adalah bagaimana pihak luar mengelola tambang emas di Papua, bagaimana perusahaan-perusahaan swasta memanfaatkan hutan dengan HPH, HTI, Perkebunan. Hasilnya tidak selalu berdampak positif melainkan menyebabkan kerusakan lingkungan atau penurunan kualitas lingkungan, hubungan sosial antara pihak luar dengan pihak komunitas lokal tidak jarang merupakan proses sosial yang menjauhkan (*dissosiatif*). Sepanjang proses sosial ini berlangsung pada hubungan (pihak luar

dengan komunitas lokal) maka paling tidak realitas tersebut menunjukkan 'gangguan pada keberadaan masyarakat (eksistensi masyarakat).

PENUTUP

Eksistensi ini berhubungan dengan kesejahteraan komunitas. Selanjutnya sangat terkait juga dengan keberadaan kelembagaan lokal karena kelembagaan dipahami sebagai kumpulan norma yang berlaku dalam suatu komunitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komunitas tersebut. Misalnya keberadaan *kewang* dalam pengelolaan *sasi* di Maluku, kelompok tani untuk manajemen kelompok, koperasi untuk bantuan modal dan pemasaran, BPD dalam perencanaan pembangunan desa dan lain sebagainya. Intinya adalah seluruh kelembagaan lokal merupakan kelembagaan yang 'bertanggung jawab' untuk memenuhi kebutuhan komunitasnya sekaligus bertanggung jawab untuk memperhatikan dan mempertahankan eksistensi masyarakat'.

Kembali pada eksistensi dengan konflik, eksistensi masyarakat yang terganggu akan menghasilkan proses sosial yang menjauhkan seperti konflik. Paling tidak konflik dapat terjadi ketika ada dua pihak yang saling atau merasa sama-sama berkepentingan akan tetapi dalam mencapai tujuannya belum sepaham sehingga harus tetap bertentangan. Pertentangan inilah yang dikenal dengan konflik. Konflik ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk berikut penyelesaiannya. Namun penekanan tulisan ini bukan menyangkut hal tersebut melainkan bagaimana eksistensi masyarakat yang terganggu ini dipahami sebagai penyebab munculnya konflik.

Kasus konflik dan 'gerakan rakyat lapar tanah' yang menuntut 'redistribusi tanah'/'*land reform*' diawali dengan ketidakaksesan masyarakat terhadap sumberdaya agraria yang ada di hadapan 'petani', sementara tuntutan kebutuhan 'sejengkal perut' petani dan keluarganya sangat mengaharapkan sumberdaya agraria untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mereka terima tidak cukup. Oleh karena itu, masyarakat juga membutuhkan BLT yang lain "Bantuan Langsung Tanah".

Beberapa alas akar yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab munculnya konflik agraria adalah ketimpangan struktur agraria dan perubahannya, ketergantungan komunitas terhadap lahan, program 'pihak luar' yang sering kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terganggunya eksistensi masyarakat (ekonomi, sosial-budayaan, politik dan bahkan ideologi) serta mudarnya kelembagaan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fisher SA *et al.* 2000. *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. British Council. Jakarta. (Tuliskan semua nama penulis)
- Geertz C. 1976. *Involusi Pertanian*. Baratakarya Aksara. Jakarta.
- Hussain. 1997. *Konflik Pertanahan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. (dalam teks tertulis Husein, mana yang benar?)
- Nurhasim M. 1977 (cek kembali tahun ini). Konflik Tanah di Jenggawah: Tipologi dan Pola Penyelesaiannya. *Prisma*. N0. 7 Tahun XXVI-Agustus.
- Popkin S. 1986. *Petani Rasional*. Yayasan Padamu Negeri. Jakarta.
- Scott JC. 1983. *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta.
- Sitorus MTF. 2002. Lingkup Agraria dalam Suhendar E (editor). *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Akatiga. Bandung.
- Soetarto E *et al.* 2001. *Studi Identifikasi Penyelesaian Kasus-kasus Pertanahan/Agraria melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pendekatan Negosiasi antar Stakeholders di Daerah*. PKA-IPB. Bogor. Tidak Diterbitkan. (Tuliskan semua nama penulis)
- [Tim Laper]. 2001. *Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Laper Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Wiradi G. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Insist Press. Yogyakarta.